

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 merupakan salah satu dari sebelas kabupaten di Provinsi Jambi yang mengikuti pilkada serentak. Dinamika politik di dalam pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sangat tinggi dimana dalam pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ini yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah merupakan petahana.

1. Bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah : *Electoral activity*, pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerjadalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiapindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum. *Lobbying*, tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untukmenghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuanuntuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut terkaitmasalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. *Organizational activity*, keterlibatan warga masyarakat ke dalamberbagai organisasi sosial dan politik. *Contactingdan Violence*, cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.
2. Faktor penghambat dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilihan calon Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu, kesibukan kegiatan sehari- hari. Sedangkan faktor pendorong untuk ikut turut berpartisipasi adalah: *Pertama*, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting

untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ikut berpartisipasi. *Kedua*, kesadaran politik dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah cukup tinggi dengan mengikuti proses pemilu secara langsung dan tidak langsung. *Ketiga*, adanya peran sosial media dalam memberikan informasi-informasi tentang pemilu. Mereka juga beranggapan bahwa partisipasi politik sifatnya sangat penting karena untuk mendukung proses memajukan daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan eksplorasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran:

1. Penulis mengharapkan dari semua pihak baik dari partai politik maupun dari semua kandidat dalam pemilihan kepala daerah, agar kesadaran politik masyarakat semakin ditingkatkan dengan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi pragmatis dalam menentukan pilihannya.
2. Diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
3. Diharapkan juga agar supaya pengawasan dan pengawalan dalam pemilihan kepala Daerah lebih diperketat agar supaya tidak terjadi lagi intervensi, interferensi dan mobilisasi massa dalam Pilkada-pilkada selanjutnya.